



## DINAMIKA TUNTUTAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN HAK ATAS SUMBER DAYA ALAM PADA DESA-DESA DALAM KAWASAN HUTAN PADA PERUSAHAAN GAS SALAMANDER ENERGY DI KABUPATEN BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Darmae Nasir

Graduate Program of Environment and Faculty of Economics, University of Palangka Raya, Indonesia

E-mail: [handnasir@gmail.com](mailto:handnasir@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2023

Diterima: 12 Juli 2023

Terbit: 1 Agustus 2023

### Keywords:

Community

Empowerment, Rights to natural resources

### Abstract

*Communities generally demand that their rights be implemented and granted in accordance with applicable regulations through programs known as corporate social responsibility (CSR) or also often called community development (CD), or business partnerships which are often known as community empowerment programs. This demand is a strong desire from the community around the company to obtain their rights from a company that operates by utilizing and processing natural resources. Various perceptions and attitudes are manifested in the form of protests, rejection, or support for various development activities at the pre-construction, construction, and post-construction stages when the company is carrying out the activities. In this research, the problems are: 1) How to implement development activities, especially those that will have a broad impact on society. 2) How various perceptions and attitudes are manifested in the form of protests, rejection, or support for various development activities. This research used qualitative research methods, carried out openly involving the people of Luwe Hulu Village, Muara Pari Village, Karenden Village and Haragandang Village as well as Village Government Apparatus. Information is obtained through open discussions by holding*

---

*informal and unscheduled meetings. Data collection was carried out by in-depth interviews with key informants, direct observation, surveys, monitoring and evaluation of participation. Based on work location analysis from PT. Salamander Energy is mostly located in permanent production forest (HP) areas with an area of 17,271.5 hectares or 55.7% of the total area, in areas where there are locations for plantation companies. Apart from that, the Kareندان Cluster area overlaps with the PT IUPHHK-HA Work Area. Austral Byna and IUPHHK-HA PT. Wana Inti Kahuripan Intiga. Field facts show that many HTI areas have been used by local residents for farming activities which are also followed by traditional rubber planting. In order to implement CSR programs or community empowerment, good communication is needed with several community leaders, village government officials and community members in the 4 villages in the research area. From the problem study carried out, conclusions can be drawn; The people in the four villages know well the rights they can get from the existence of companies that exploit natural resources around their villages. It is hoped that the presence of the company PT. Salamander Energy will be able to make a positive contribution to the community's economy.*

---

**Kata kunci:**

Pemberdayaan Masyarakat, Hak atas sumberdaya alam

**Corresponding Author:**

Darmae Nasir, e-mail : [handnasir@gmail.com](mailto:handnasir@gmail.com)

**Abstrak**

---

Masyarakat umumnya menuntut dilaksanakan dan diberikannya hak-hak mereka sesuai peraturan yang berlaku melalui program yang dikenal sebagai corporate social responsibility (CSR) atau juga sering disebut comunity development (CD), ataupun kemitraan usaha yang sering dikenal dengan program pemberdayaan masyarakat. Tuntutan tersebut adalah keinginan kuat dari masyarakat disekitar perusahaan untuk mendapatkan hak-haknya dari perusahaan yang bergerak dengan memanfaatkan dan mengolah sumberdaya alam. Beragamnya persepsi dan sikap yang termanifestasi dalam bentuk protes, penolakan, atau dukungan terhadap berbagai kegiatan pembangunan baik pada tahap prakonstruksi, kontruksi, maupun pascakonstruksi pada saat perusahaan akan melaksanakan kegiatan. Dalam penelitian ini, yang menjadi permasalahan adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan kegiatan pembangunan, terutama

yang akan mempunyai dampak luas bagi masyarakat. 2) Bagaimana ragam persepsi dan sikap yang termanifestasi dalam bentuk protes, penolakan, atau dukungan terhadap berbagai kegiatan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat Desa Luwe Hulu, Desa Muara Pari, Desa Karenden dan Desa Haragandang serta Aparatur Pemerintah Desa. Informasi diperoleh melalui diskusi terbuka dengan menggelar pertemuan secara informal dan tidak terjadwal. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara mendalam dengan informan kunci, pengamatan langsung, survey, monitoring dan evaluasi partisipasi. Berdasarkan analisis Lokasi kerja dari PT. Salamander Energy lebih banyak berada pada kawasan hutan produksi tetap (HP) dengan luasan 17.271,5 hektar atau 55,7% dari total luasan, dalam area terdapat lokasi untuk perusahaan perkebunan. Selain itu Areal Karendan Cluster bertumpang tindih dengan Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Austral Byna dan IUPHHK-HA PT. Wana Inti Kahuripan Intiga. Fakta lapangan memperlihatkan bahwa area HTI banyak yang sudah digunakan oleh penduduk setempat untuk kegiatan perladangan yang juga diikuti dengan penanaman karet secara tradisional. Dalam rangka pelaksanaan program CSR atau pemberdayaan masyarakat, diperlukan sebuah komunikasi yang baik dengan beberapa tokoh masyarakat, Aparatur pemerintah Desa dan warga masyarakat di 4 Desa yang menjadi wilayah penelitian. Dari kajian permasalahan yang dilakukan dapat diambil kesimpulan; Masyarakat di empat desa mengetahui dengan baik hak-hak yang dapat mereka dapatkan dari keberadaan usaha perusahaan yang melakukan eksploitasi sumberdaya alam disekitar desa mereka. Hadirnya perusahaan PT. Salamander Energy diharapkan akan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian masyarakat.

*@Copyright 2023.*

## **PENDAHULUAN**

Era reformasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam dunia politik, ekonomi dan sosial di Indonesia. Perubahan tersebut terutama ditandai dengan mulai hidupnya semangat masyarakat dalam berbagai level terutama level akar rumput untuk memiliki andil dan mendapat hak-hak dasarnya sebagai warga negara Indonesia pada berbagai bidang kehidupan. Kesadaran yang tumbuh tersebut memiliki potensi untuk dapat memberi manfaat sehingga memberi dampak positif kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian kesadaran untuk memperjuangkan hak-haknya tersebut juga potensial memberi efek negatif bagi kelompok masyarakat yang lain apabila tuntutan tersebut tidaklah merupakan hak yang merupakan kebutuhan nyata dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada level komunitas, hak individu atau sekelompok kecil masyarakat akan dapat berdampak negatif bagi masyarakat keseluruhan apabila tidak ada kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan tertentu yang adalah merupakan kebutuhan nyata suatu komunitas. Keinginan kelompok juga akan berpotensi untuk memacu terjadinya disintegrasi masyarakat dan menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara berbagai pihak dalam suatu komunitas dan juga dengan kelompok komunitas yang lain. Oleh karena itu, untuk memperjuangkan hak-haknya tersebut, masyarakat yang menuntut dan juga pihak yang berkewajiban memberikan hak-hak tersebut haruslah dapat berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik hanya akan dapat terjadi apabila kedua belah pihak dapat memberikan saling pengertian dan kerjasama untuk menuju kepada suatu kesepakatan bersama mengenai apa yang dituntut dan bagaimana tuntutan tersebut dipenuhi sesuai dengan ketentuan dan juga kesepakatan bersama.

Masyarakat umumnya menuntut dilaksanakan dan diberikannya hak-hak mereka sesuai peraturan yang berlaku melalui program yang dikenal sebagai corporate social responsibility (CSR) atau juga sering disebut community development (CD), ataupun kemitraan usaha yang dalam level masyarakat akar rumput sering dikenal dengan program pemberdayaan masyarakat. Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dalam implementasinya sangat berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, Undang -Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang seolah-olah melengkapi semuanya dengan ditetapkannya kewajiban perusahaan untuk membuat dokumen tentang pengelolaan lingkungan hidup yang tidak saja berbicara mengenai aspek biofisik tetapi juga aspek sosial, ekonomi dan budaya dan bahkan juga bersinggungan masalah politik.

Ketentuan perundangan tersebut diatas, mulai digiatkan penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) ataupun community development (CD). Tujuannya adalah dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk menerima manfaat dengan tujuan akhir semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar dan kegiatan perusahaan sejak awal dapat berjalan

sesuai dengan rencana. Untuk itu diperlukan informasi yang lengkap mengenai keadaan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan, bahkan pandangan politik dari masyarakat sekitar sehingga program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan berhasil guna bagi masyarakat, perusahaan dan pemerintah.

Pemetaan sosial (*social mapping*) didefinisikan sebagai proses penggambaran masyarakat yang sistematis serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat termasuk di dalamnya profile dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Merujuk pada Netting, Kettner dan McMurtry (1993) dalam Suharto, (2013), pemetaan sosial dapat disebut juga sebagai social profiling atau “pembuatan profile suatu masyarakat”. Mengutip Suharto, (2013), Pemetaan sosial adalah merupakan salah satu pendekatan dalam pengembangan masyarakat yang daripadanya akan diperoleh gambaran mengenai pemusatan karakteristik masyarakat atau masalah sosial. Karakteristik atau masalah sosial dimaksud misalnya, beberapa masyarakat memiliki wilayah (luas-sempit), komposisi etnik (heterogen-homogen) dan status sosial-ekonomi (kaya-miskin atau maju-tertinggal) yang berbeda satu sama lain.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini : 1) Bagaimana pelaksanaan kegiatan pembangunan, terutama yang akan mempunyai dampak luas bagi masyarakat, terjadinya perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan selama ini telah membawa pengaruh dan pergeseran terhadap tata hubungan di antara berbagai elemen sosial dan ekonomi; Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan kelompok-kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat. 2) Bagaimana ragam persepsi dan sikap yang termanifestasi dalam bentuk protes, penolakan, atau dukungan terhadap berbagai kegiatan pembangunan baik pada tahap prakonstruksi, konstruksi, maupun pascakonstruksi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat Desa Luwe Hulu, Desa Muara Pari, Desa Karenden dan Desa Haragandang serta Aparatur Pemerintah Desa. Informasi diperoleh melalui diskusi terbuka dengan menggelar pertemuan secara informal dan tidak terjadwal, Mengikuti apa yang dikemukakan oleh Suharto (2013) metode pamantauan cepat adalah meliputi:

- a. Wawancara Informan Kunci (Key Informant Interview). Wawancara ini terdiri serangkaian pertanyaan terbuka yang dilakukan terhadap individu-individu tertentu yang sudah diseleksi karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai topik atau keadaan di wilayahnya. Wawancara bersifat kualitatif, mendalam dan semi-terstruktur.
- b. Pengamatan Langsung (Direct Observation). Melakukan kunjungan lapangan atau pengamatan langsung terhadap masyarakat setempat. Data yang dikumpulkan dapat berupa informasi mengenai kondisi geografis, sosial-ekonomi, sumber-sumber yang tersedia, kegiatan program yang sedang berlangsung, interaksi sosial, dll.
- c. Survey Kecil (Mini-Survey). Penerapan kuesioner terstruktur (daftar pertanyaan tertutup maupun terbuka) terhadap sejumlah kecil sample (antara 50-75 orang secara total terutama dari desa terdampak langsung). Pemilihan responden dapat menggunakan teknik acak (random sampling)

ataupun sampel bertujuan (purposive sampling). Wawancara dilakukan pada lokasi-lokasi survey yang terbatas pada lokasi yang dianggap aman.

- d. Monitoring dan Evaluasi Partisipatoris (Participatory Monitoring and Evaluation). Metode ini melibatkan anggota masyarakat dari berbagai tingkatan yang bekerjasama mengumpulkan informasi, mengidentifikasi dan menganalisis masalah, serta melahirkan rekomendasi-rekomendasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

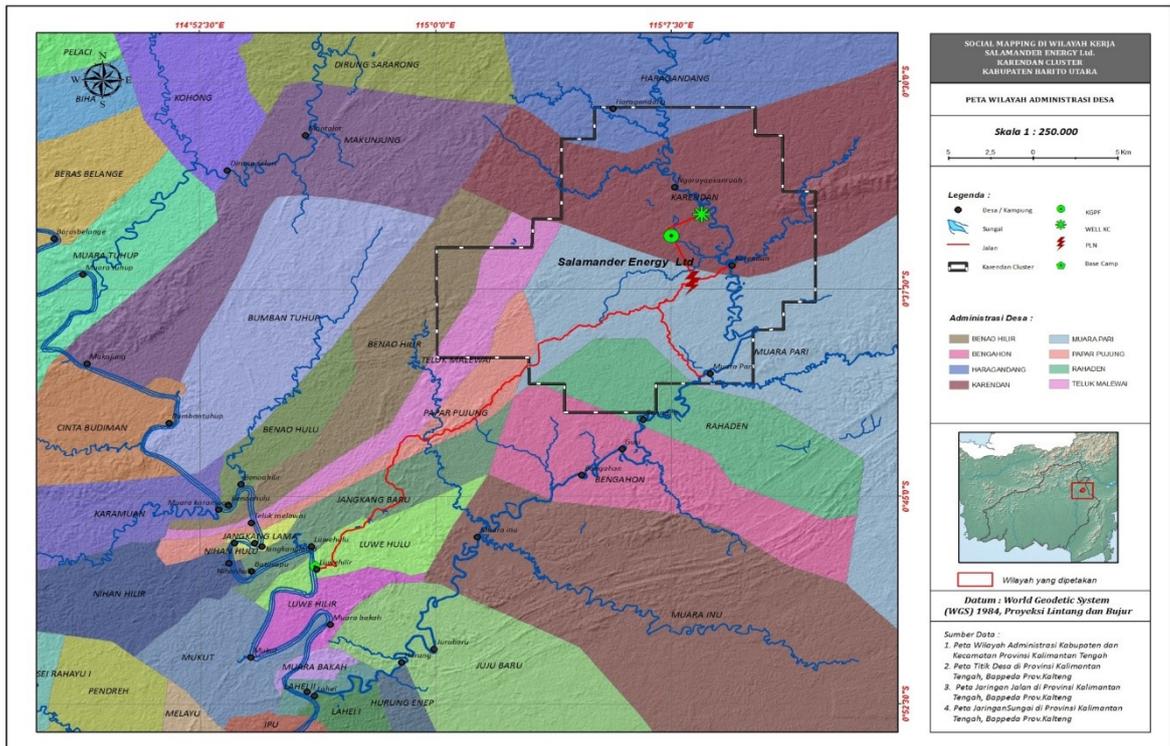
Wilayah operasional Salamander Energy Ltd. di Blok Karendan Cluster secara administrasi kewilayahan berada di Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Secara geografis Karendan Cluster berada pada ruang antara 0° 30' 56.31" LS - 0° 41' 58.27" LS dan 115° 0' 2.58" BT - 115° 12' 5.70" BT. Wilayah operasional Karendan Cluster mempunyai luas ± 31.000 Ha, dan bila dilihat dari administrasi desa yang berada Kecamatan Lahei, wilayah ruang Karendan Cluster terbagi atas beberapa desa. Luasan dan Persentase luasan desa yang berada di Karendan Cluster ditampilkan pada Tabel 1, berikut:

Tabel.1. Luasan dan Persentase Administrasi Desa di wilayah Karendan Cluster, Salamander Energy Ltd

Desa	Luas (ha)	%
Benaohilir	1.167,6	3,8
Bengahon	167,2	0,5
Haragandang	1.730,9	5,6
Karendan	11.475,5	37,0
Papar Pujung	867,0	2,8
Rahaden	2.728,0	8,8
Teluk Malewai	2.380,2	7,7
Muara Pari	10.483,5	33,8
<b>Total</b>	<b>31.000,0</b>	<b>100,0</b>

Sumber : data lapangan yang diolah

Dari segi luasan terlihat bahwa desa yang harus menjadi perhatian utama adalah desa Karendan dan Muara Pari. Hal ini ditunjukkan dengan luasan yang mencapai 37,0% dan 33,8% dari total luasan atau dengan kata lain sebanyak 70,8% wilayah kerja dari Salamander Energy adalah berada pada kedua desa tersebut. Lebih jelasnya dapat dilihat pada peta terlampir berikut ini.



1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan, terutama yang akan mempunyai dampak luas bagi masyarakat, terjadinya perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan selama ini telah membawa pengaruh dan pergeseran terhadap tata hubungan di antara berbagai elemen sosial dan ekonomi; Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan kelompok-kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat.

Lokasi kerja dari PT. Salamander Energy lebih banyak berada pada kawasan hutan produksi tetap (HP) dengan luasan 17.271,5 hektar atau 55,7% dari total luasan. Juga ada pada Areal penggunaan lain yang walaupun hanya 11,3% dari total area atau seluas 3.499,3 hektar, harus juga menjadi perhatian, karena itu mengindikasikan bahwa wilayah kerja adalah kawasan permukiman penduduk dan juga tempat dimana aktivitas penduduk mengambil tempat utama.

Dalam lokasi kerja dari PT. Salamander Energy terdapat juga lokasi untuk perusahaan perkebunan. Hal ini menjadi sesuatu yang krusial mengingat usaha perkebunan tentu saja memerlukan luasan yang luas. Kepentingan untuk pengembangan usaha akan dapat menimbulkan berbagai isu yang tentu saja dapat berimbas pada kegiatan usaha PT. Salamander Energy. Isu yang sering menjadi bahan tuntutan masyarakat adalah kebun plasma yang artinya penduduk akan mendapat hak atas kebun. Hal ini sangat berbeda dengan usaha pertambangan, khususnya Migas seperti yang diusahakan oleh Salamander energy.

Areal lokasi kerja dari PT. Salamander Energy hampir 70% Areal Karendan Cluster bertumpang tindih dengan Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Austral Byna dan IUPHHK-HA PT. Wana Inti Kahuripan Intiga. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2. Luasan dan Persentase Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK HA) di wilayah Karendan Cluster, Salamander Energy Ltd berdasarkan Administrasi Desa

Nama Desa	Luas IUPHHK-HA (Ha)		Luas Total (Ha)	%
	Austral Byna	Wana Inti Kahuripan Intiga		
Benaو Hilir	1.176,6	-	1.176,6	3,8
Bengahon	0,4	-	0,4	0,0
Haragandang	-	494,9	494,9	1,6
Karendan	6.491,1	1.594,0	8.085,1	26,1
Muara Pari	6.867,7	-	6.867,7	22,2
Papar Pujung	874,4	-	874,4	2,8
Rahaden	1.690,9	-	1.690,9	5,5
Teluk Malewai	2.362,0	5,7	2.367,7	7,6
<b>Total</b>	<b>19.463,1</b>	<b>2.094,6</b>	<b>21.557,7</b>	<b>69,5</b>
<b>Luas Karendan Cluster</b>			<b>31.000</b>	

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara

Ijin HPH yang bekerja juga pada lokasi yang sama adalah PT. Austral Byna dan PT. Wana Inti Kahuripan Intiga (WIKI). Kedua perusahaan ini walaupun aktivitasnya sudah jauh menurun, namun dari segi luasan menjadi sangat penting, karena 69,5% atau 21.557,7 hektar dari total wilayah kerja dari PT. Salamander Energy adalah berada dalam kawasan kedua perusahaan HPH dimaksud. Jalan-jalan utama maupun akses untuk produksi dari kedua HPH ini akan menjadi akses bagi berbagai kegiatan lainnya seperti perladangan dan perkebunan masyarakat secara perorangan maupun kelompok. Isu kepemilikan lahan dengan demikian akan semakin meluas, tidak saja pada kawasan APL tetapi juga pada kawasan hutan produksi.

Hasil analisis menunjukkan lebih dari 10% Areal Karendan Cluster bertumpang tindih dengan Areal Kerja IUPHHK-HT PT. Meranti Sembada, untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3. Luasan dan Persentase Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Wilayah Karendan Cluster, Salamander Energy Ltd berdasarkan Administrasi Desa

Nama Desa	IUPHHK-HT (Ha)	Luas Total (Ha)	%
	Meranti Sembada		
Benaو Hilir	-	-	-
Bengahon	-	-	-
Haragandang	-	-	-
Karendan	795,6	795,6	2,6
Muara Pari	2.111,4	2.111,4	6,8
Papar Pujung	-	-	-
Rahaden	262,0	262,0	0,8
Teluk Malewai	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3.169,0</b>	<b>3.169,0</b>	<b>10,2</b>

Nama Desa	IUPHHK-HT (Ha)	Luas Total (Ha)	%
	Meranti Sembada		
<b>Luas Karendan Cluster</b>		31.000	

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara

Fakta lapangan memperlihatkan bahwa area HTI banyak yang sudah digunakan oleh penduduk setempat untuk kegiatan perladangan yang juga diikuti dengan penanaman karet secara tradisional. Terungkap bahwa banyak masyarakat yang mengklaim kembali bekas ladang mereka yang digunakan untuk area HTI dan diakui sebagai milik mereka. Alasannya adalah karena dulu hanya dilakukan ganti rugi tebas tebang bukan penjualan. Hal ini sangat umum menjadi alasan untuk kembali mengklaim area tersebut sebagai lahan milik secara adat.

Analisis keruangan menunjukkan bahwa ada lebih dari 70% Areal Karendan Cluster bertumpang tindih dengan Usaha Pertambangan Batubara di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, hal ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4. Luasan dan Persentase Usaha Pertambangan Batubara di Wilayah Karendan Cluster, Salamander Energy Ltd berdasarkan Administrasi Desa

Nama Desa	Nama dan Luas Usaha Pertambangan (Ha)							Luas Total (Ha)	%
	Bangun Tambang Makmur	Bara Barito Perkasa	Eagle Coal Int.	Multi Tambang Lestari	Sumatera Timur Ind.	Sumber Jenjang Abadi	Sumber Tambang Rezeki		
Benao Hilir	484,3	-	-	354,1	285,8	-	-	1.124,2	3,6
Bengahon	-	159,5	-	-	-	-	-	159,5	0,5
Haragandang	-	-	1.529,1	-	-	-	216,7	1.745,8	5,6
Karendan	640,1	1.099,6	1.106,3	402,0	-	3.554,2	1.290,0	8.092,2	26,1
Muara Pari	-	611,4	-	1.572,9	1.476,2	3.194,7	-	6.855,2	22,1
Papar Pujung	-	-	-	25,9	848,5	-	-	874,4	2,8
Rahaden	-	236,8	-	-	457,2	0,7	-	694,7	2,2
Teluk Malewai	-	-	-	1.320,7	1.021,1	-	-	2.341,8	7,6
<b>Total</b>	<b>1.124,4</b>	<b>2.107,3</b>	<b>2.635,4</b>	<b>3.675,6</b>	<b>4.088,8</b>	<b>6.749,6</b>	<b>1.506,7</b>	<b>21.887,8</b>	<b>70,6</b>
<b>Luas Karendan Cluster</b>								<b>31.000</b>	

Dari tabel 4. tersebut dapat kita simpulkan bahwa usaha pertambangan batubara adalah merupakan usaha yang paling dominan yang ada pada lokasi kegiatan/kerja dari PT. Salamander Energy. Kegiatan ini tidak saja mencakup beberapa desa yang juga menjadi binaan utama dari Salamander Energy tetapi juga berada pada wilayah desa lainnya. Terungkap bahwa 70,6% atau seluas 21.887,8 hektar adalah juga merupakan kawasan yang telah mendapat izin untuk usaha

pertambangan batubara. Dengan keadaan demikian maka usaha PT. Salamander Energy mendapat tantangan serius dari segi penguasaan lahan dan perijinan terutama dari perusahaan Batubara. Untuk itu maka sangat diperlukan perhatian yang serius dari perusahaan untuk menghindari konflik yang dapat saja terjadi sebagai sebuah bentuk dari persaingan usaha. Apabila perusahaan-perusahaan ini aktif nantinya, akan sangat berdampak pada masyarakat sekitar dan isu sosial maupun lingkungan hidup akan semakin menjadi hal yang signifikan untuk diantisipasi

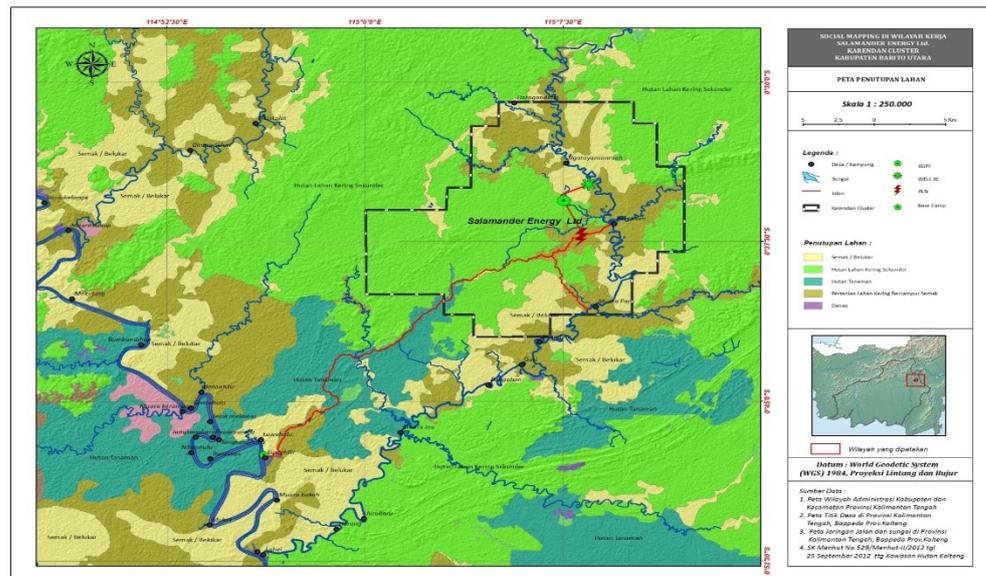
Analisis penutupan lahan di wilayah Karendan Cluster menggunakan data Peta Penutupan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Dari hasil analisis terlihat bahwa lebih dari 50% Wilayah Karendan Cluster merupakan daerah Hutan Lahan Kering Sekunder. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5 berikut :

Tabel 5. Luasan jenis Tutupan Lahan di Wilayah Karendan Cluster, Salamander Energy Ltd berdasarkan Administrasi Desa

Penutupan Lahan	Nama Desa dan Luas (Ha)								Luas Total	%
	Benaohilir	Bengahon	Hara-gandang	Karendan	MuaraPari	PaparPujung	Rahaden	TelukMalewai		
Danau	-	-	12,5	96,2	103,9	-	1,5	-	212,2	0,7
Hutan Lahan Kering Sekunder	1.177,8	24,5	74,1	4.787,4	6.354,5	872,2	1.122,8	2.196,7	16.465,5	53,1
Hutan Tanaman	-	-	-	-	214,0	2,5	-	-	214,6	0,7
Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak	-	-	971,6	3.925,3	2.266,0	-	294,7	-	7.392,7	23,8
Semak / Belukar	-	144,2	688,0	2.767,2	1.637,2	-	1.332,9	204,3	6.714,9	21,7
<b>Grand Total</b>	<b>1.177,8</b>	<b>168,7</b>	<b>1.746,2</b>	<b>11.576,1</b>	<b>10.575,6</b>	<b>874,7</b>	<b>2.751,9</b>	<b>2.401,0</b>	<b>31.000,0</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Salamander Energy Ltd

Dari analisis tersebut, yang harus menjadi pusat perhatian adalah kawasan hutan tanaman, Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak dan semak belukar. Hal ini mengingat bahwa secara adat Dayak, walaupun tidak disertai dengan bukti kepemilikan berupa surat tanah, ketiga jenis lahan demikian mempunyai klaim secara adat baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Dasar klaim tersebut adalah bahwa mereka telah menggunakannya sebagai ladang pada masa lalu. Baik yang ditanami maupun yang tidak ditanami, secara adat hak mereka diakui. Terungkap bahwa desa Karendan dan Muara Pari adalah desa yang paling besar memiliki jenis tutupan lahan demikian. Hal ini berarti, secara klaim kepemilikan lahan secara adat kedua desa ini memiliki luasan lahan yang terbesar. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada peta terlampir.



1. Persepsi dan sikap yang termanifestasi dalam bentuk protes, penolakan, atau dukungan terhadap berbagai kegiatan pembangunan baik pada tahap prakonstruksi, konstruksi, maupun pasca konstruksi

a. Desa Luwe Hulu

Desa Luwe Hulu, yang terletak di Sungai Barito, mempunyai penduduk yang nampaknya cukup heterogen dan berlatar belakang budaya yang beragam. Desa ini pada awalnya hanya desa kecil, namun dengan keberadaan camp PT. Wiki (HPH) di ujung bagian hulu desa Luwe Hulu, desa ini berkembang menjadi sebuah desa yang penduduknya berasal dari beberapa desa sekitar dan juga yang berasal dari desa yang cukup jauh bahkan dari luar Barito Utara. Karenanya penduduk dan permasalahan sosial politik, ekonomi dan budayanya sedikit berbeda dengan desa lainnya yang berada didalam sungai Lahei. Namun demikian sebagian besar penduduknya mempunyai hubungan kekerabatan dengan penduduk yang bermukim pada desa-desa yang berada tidak jauh dari Muara Sungei Lahei, yang mana mereka juga menggarap tanah di sepanjang jalan menuju Karendan.

Hubungan kekerabatan ini menyebabkan adanya komunikasi dan solidaritas yang cukup erat antara penduduk Desa Luwe Hulu dengan beberapa desa tua (telah ada sejak lama di sei Lahei) dan berpenduduk banyak seperti desa Muara Inu. Para pembuat opini atau master mind beberapa gerakan protes dan atau tuntutan ganti rugi ternyata digerakan oleh penduduk yang ada di desa Muara Inu dengan mengikutsertakan keluarganya yang bermukim di Luwe Hulu. Hal ini disebabkan, banyak tanah disepanjang jalan menuju Karendan, adalah dimiliki oleh penduduk Muara Inu dan juga penduduk Luwe Hulu yang asal muasalnya adalah dari desa Muara Inu.

Kelompok masyarakat yang ada didesa Luwe Hulu dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria. Kriteria pertama adalah berdasarkan kelompok agama yang sekaligus juga menggambarkan kelompok suku. Kriteria kedua adalah kelompok yang mempunyai hubungan keluarga dan afiliasi politik dengan perangkat desa termasuk juga kepala desanya. Kami juga berhasil mengidentifikasi kelompok ketiga yaitu kelompok yang sering melakukan protes dan tuntutan terhadap perusahaan. Untuk desa ini adalah sulit untuk menemukan tokoh sentral yang menjadi panutan dari para warga didesa Luwe Hulu yang dapat mereka percayai menjadi wakil mereka dalam menyampaikan aspirasi ataupun tuntutan baik itu dari Pemerintah maupun dari pihak perusahaan tanpa melihat kelompok agamanya.

Dalam rangka untuk melakukan pendekatan program CSR atau pemberdayaan masyarakat, diperlukan sebuah komunikasi yang baik dengan beberapa tokoh seperti yang telah disebutkan. Warga masyarakat yang kami temui dalam diskusi dan wawancara informal mengatakan bahwa pola pendekatan yang mesti dilakukan oleh perusahaan adalah dengan terlebih dahulu menjalin komunikasi dan memberikan informasi kepada tokoh-tokoh agama dan juga tokoh lainnya, baru kemudian menyampaikannya kepada perangkat desa.

Tokoh-tokoh ini akan mengkomunikasikannya terlebih dahulu dengan ketua BPD dan selanjutnya, secara bersama-sama menghadap Kepala Desa. Langkah selanjutnya adalah bersama-sama dengan tokoh tersebut, pihak perusahaan dapat menghadap kepala Desa untuk merundingkan apa dan bagaimana program tersebut dilaksanakan di desa.

b. Desa Muara Pari

Desa Muara Pari adalah merupakan desa kedua terdekat dengan pusat kegiatan dari Salamander Energy apabila dilihat dari adanya jalan yang menghubungkannya dengan pusat kegiatan, setelah desa Karendan. Namun demikian apabila dilihat dari jaraknya berdasarkan sungai, desa ini juga cukup jauh. Desa ini agak berbeda dengan desa Luwe Hulu. Penduduknya dapat dikatakan adalah semuanya adalah penduduk lokal yang telah bermukim lama di desa tersebut. Masyarakatnya terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok yang merupakan suku Dayak asli dan Bakumpai. Karenanya, agama penduduknya yang dominan adalah Islam dan selanjutnya Kristen dan sedikit Kaharingan. Namun demikian, ketokohan tidak didasarkan kelompok agama. Didesa ini, keberadaan tokoh muncul karena memang orang yang patut menjadi panutan.

Tokoh masyarakat yang disegani di Muara Pari adalah tokoh yang dianggap dapat menjadi panutan dan juga dapat menjadi penyalur aspirasi masyarakat. Pada umumnya, masyarakat desa ini juga menjadi terkelompok karena persaingan dalam Pemilihan kepala desa, seperti halnya desa-desa lain di Sei Lahei termasuk juga Luwe Hulu. Namun demikian kelompok berdasarkan agama atau suku tidak muncul didesa ini

karena adat istiadat Dayak cukup dominan dalam mengatur hubungan antar penduduk. Namun demikian karena afiliasi Politik dalam level Kepala Desa atau juga afiliasi ke Partai politik, ada sedikit gejala yang membuat masyarakat menjadi seperti mempunyai kelompok dan pimpinannya masing-masing.

Untuk kepentingan afiliasi dan pengembangan komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat Muara Pari, nampaknya mereka mempunyai beberapa tokoh lintas agama dan lintas kelompok lainnya (pro atau kontra Kades dan kritis sekali menuntut haknya dari perusahaan sekitar) ada 5 (lima) orang yang dapat mengembangkan komunikasi dengan semua kelompok masyarakat termasuk juga perangkat desa. Untuk itu, kelima tokoh ini dapat dipandang sebagai pintu masuk untuk berkomunikasi secara baik dan terbuka dengan seluruh masyarakat Muara Pari. Karenanya dalam pengembangan program, hendaknya kelima tokoh ini, adalah orang-orang yang lebih dahulu dihubungi untuk selanjutnya dikomunikasikan dengan perangkat desa dan masyarakat secara luas.

Sama halnya dengan penduduk Luwe Hulu, penduduk desa Muara Pari juga sangat mendambakan bantuan dari program CSR untuk pendidikan dan pelatihan bagi warganya yang tujuannya adalah dalam rangka memberi mereka bekal untuk dapat bekerja pada perusahaan disekitar Lahei atau Barito Utara. Mereka menyadari betul bahwa penduduknya mempunyai pendidikan yang belum memadai. Desa ini telah mempunyai pengolah air bersih dan pada saat kunjungan lapangan distribusinya kerumah-rumah penduduk sedang dibangun. Untuk bidang pendidikan mereka juga meminta adanya bantuan untuk tenaga pengajar mengingat dari 8 orang guru SD Muara Pari, 4 orang adalah GTT (guru tidak tetap/honorar) dan juga pengembangan perpustakaan baik untuk koleksi buku dan juga fasilitas ruang perpustakaannya. Keinginan lain yang sangat didambakan oleh masyarakat adalah adanya tower telepon (Telkomsel) sehingga desa ini terjangkau oleh layanan telepon seluler.

c. Desa Karendan

Desa Karendan adalah merupakan desa yang terdekat dengan pusat kegiatan Salamander Energy terutama dengan bangunan pembangkit milik PLN yang sekarang dalam tahap konstruksi. Desa ini adalah merupakan desa terdampak utama yang kedua, setelah Luwe Hulu. Luwe Hulu mendapat dampak dari kegiatan suplai material dan peralatan/mesin yang diperlukan oleh pembangkit dan sumur gas di sekitar desa Karendan. Luwe Hulu adalah menerima dampak seperti sebuah pelabuhan, dan Karendan menerima dampak sebagaimana yang ditimbulkan oleh sebuah pabrik/industri.

Desa ini mempunyai pengelompokan masyarakat yang cukup unik. Kelompok perangkat desa nampaknya menjadi kelompok yang menjadi sorotan dalam masyarakat. Hal ini berhubungan dengan adanya semacam kecemburuan terhadap adanya berbagai fasilitas bantuan baik

yang berasal dari perusahaan maupun dari pemerintah. Terdapat berbagai isu yang intinya adalah bahwa perangkat desa menikmati banyak keuntungan dari berbagai fasilitas maupun bantuan yang diterima oleh desa. Isu ini menyebabkan kurang mesranya komunikasi dan hubungan antara masyarakat dengan perangkat desa.

Pendekatan yang dapat dilakukan untuk pengembangan program pemberdayaan adalah mengkomunikasikannya dengan tokoh masyarakat yang ada. Prosesnya adalah seperti yang dilakukan pada desa Luwe Hulu. Komunikasikan dulu dengan tokoh masyarakat baru kemudian secara formal dikomunikasikan dengan perangkat desa dan harus dipastikan bahwa nantinya keputusan diambil berdasarkan kehendak masyarakat. Program yang sangat didambakan hampir sama saja dengan desa lainnya. Desa ini membutuhkan instalasi air bersih dan juga terutama bantuan untuk tambahan guru dan juga bantuan keuangan untuk memberi gaji yang layak untuk GTT yang ada. Pengembangan perpustakaan juga adalah sangat diperlukan untuk pengembangan pendidikan. Keinginan terjangkau layanan telpon seluler dengan adanya Tower Telkomsel adalah keinginan yang sangat kuat mengingat penduduk dewasa kebanyakan sudah memiliki telpon seluler.

d. Desa Haragandang

Desa Haragandang adalah desa yang mempunyai penduduk paling banyak sepanjang Sei Lahei yang mana relatif lebih maju terutama dalam hal perekonomian. Desa ini walaupun berada paling ujung/hulu, namun nampaknya perekonomian masyarakat cukup berkembang yang dibuktikan dengan bagusnya kualitas secara rata-rata bangunan yang dihuni oleh penduduk desa. Penduduk setempat menyatakan mereka rata-rata memiliki kebun karet yang cukup luas. Hal ini didukung dengan banyaknya lahan/hutan yang bisa diakses oleh masyarakat dan bisa dikonversi menjadi lahan perkebunan.

Kelompok masyarakat di Desa Haragandang nampaknya terkelompok kedalam aliansi calon Kades yang kalah dan Kades terpilih. Pengelompokan menurut agama tidak terjadi didesa ini mengingat hampir 99% penduduknya (tidak termasuk dusun yg masuk dalam desa Haragandang) adalah beragama Islam. Pengelompokan yang ada lebih bernuansa persaingan politis level desa.

Dari diskusi dengan masyarakat dan juga guru-guru, nampaknya mempunyai tokoh yang direkomendasikan untuk dapat menjadi perwakilan mereka dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat baik yang berasal dari Pemerintah maupun yang berasal dari perusahaan. Adapun tokoh-tokoh yang dianggap mampu dan bisa dipercaya adalah: Aliansyah, Buhari, Syahrin, Mahing, Maskaben, dan, Yan Bima. Keenam orang ini adalah orang-orang yang mampu menjembatani dua kelompok yang ada dalam masyarakat dan menjadi pintu masuk kepada masyarakat luas.

Pendekatan yang dilakukan untuk merencanakan hingga melaksanakan sebuah program pemberdayaan untuk Desa Haragandang

sejogyanya dilakukan dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada para tokoh seperti yang disebutkan diatas. Para tokoh ini selanjutnya dipersilahkan untuk mengkomunikasikannya kepada masyarakat dan seterusnya dikomunikasikan kepada perangkat desa. Proses pengambilan keputusan dimana perangkat desa mesti ikut, harus dipastikan melibatkan tokoh masyarakat tadi. Pelibatan mereka secara aktif dalam tahapan perencanaan hingga pelaksanaan akan membantu lancarnya program.

Sama halnya dengan desa lainnya, karena desa ini adalah desa paling ujung, mereka sangat mendambakan jalan yang fungsional sepenuhnya baik pada musim kemarau ataupun musim hujan, sehingga mereka dapat dengan cepat dan lancar pergi dan pulang ke Haragandang. Telpon seluler nampaknya adalah alat komunikasi yang dimiliki umum oleh masyarakat, walaupun penggunaannya didesa hanya sebatas untuk mendengarkan musik atau membuat foto. Oleh karenanya penduduk desa ini sangat mendambakan adanya Tower Telkomsel sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan lancar dengan kerabat yang ada di desa Lahei dan juga desa lainnya. Instalasi air bersih sangat didambakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selain itu untuk pengembangan pendidikan sangat diperlukan bantuan penggajian untuk guru tidak tetap (GTT) yang ada serta pengembangan sarana dan prasarana sekolah, terutama perpustakaan

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari kajian permasalahan yang dilakukan di empat desa yang masuk dalam wilayah kerja PT.Salamander Energy yaitu Desa Luwe Hulu, Desa Muara Pari, Desa Karendan dan Desa Haragandang dapat diberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Masyarakat di empat desa mengetahui dengan baik hak-hak yang dapat mereka dapatkan dari keberadaan usaha perusahaan yang melakukan eksploitasi sumberdaya alam disekitar desa mereka. mereka telah akrab dengan perusahaan-perusahaan HPH, dan selama itu mereka mendapatkan berbagai bantuan dari HPH dimaksud. Seiring dengan masuknya usaha pertambangan terutama Batubara disekitar wilayah kerja, khususnya PT. Salamander Energy (Bangkanai) LTD, yang bergerak dalam usaha gas diharapkan akan memberi manfaat dalam program pemberdayaan masyarakat.
- b. Hadirnya perusahaan PT.Salamander Energy diharapkan akan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian masyarakat setempat dengan memberikan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan juga memberikan manfaat sosial lainnya melalui kegiatan community development atau nama lainnya yang bertujuan untuk membantu pengembangan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hartono, S. R. 2010. Corporate Social Responsibility Teori Dan Praktik. Kata Pengantar untuk buku karangan Suparoyo.H.S. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Kasali R. 2007. Kajian Stakeholders Dalam Corporate Communication, tersedia <http://komunikasi.us/index.php/course/strategic-corporate-communication/2049-kajian-stakeholders-dalam-corporate-communication>
- Kementrian Pekerjaan Umum, 2010, PNPM Madiri Perkotaan, Pemetaan Sosial.
- Menteri Pekerjaan Umum, 2013, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor.05/PRT/M/2013 tentang Pedoman Pemetaan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Pekerjaan Umum.
- SKK Migas , 2012. Pemetaan Sosial Daerah Penghasil Migas. Available at <http://migas.bisbak.com/pengantar.html>
- Suharto, Edi. 2013. Metode dan Teknik Pemetaan Sosial. Available at [http://www.policy.hu/suharto/modul\\_a/makindo\\_18.htm](http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_18.htm)
- Rujito, B & Famiola. M. 2013. Social Mapping, Metode Pemetaan Sosial, Rekayasa Sains Bandung.
- Rusan, A, Nasir D, Takari D, dan Sintani, L. 2014. Pendapatan Petani Karet di Provinsi Kalimantan Tengah. Kerjasama Dinas Perkebunan Provinsi kalimantan Tengah dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Lembaga Penelitian Universitas Palangka Raya.
- Sitepu, Andre Christian dan Hasan Sakti Siregar. (2009). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Tahunan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Akuntansi 19 Tobing . L (2013) Aturan-Aturan Hukum Corporate Social Responsibility <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52716870e6a0f/aturan-aturan-hukum-corporate-social-responsibility>
- Utama, S. 2007. Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia. <http://www.ui.edu>
- Widiyanto. A. E.. 2015. CSR dan UU Desa, terdapat [http://www.academia.edu/7664437/CSR\\_DAN\\_UU\\_DESA](http://www.academia.edu/7664437/CSR_DAN_UU_DESA)
- Zaki. Ar. Hakim A dan Nurani F. 2013. Dampak Sosial Ekonomi Pertambangan Minyak Dan Gas Banyu Urip Kabupaten Bojonegoro (Studi Pada Masyarakat Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Vol 1, No.2, Hal. 1-7.